

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang antar daerah yang berbeda-beda, perbedaan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya, serta sebaran sumberdaya alam. Tumbuhnya pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah yang menyebabkan timbulnya daerah-daerah sebagai pusat pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi.

Pemerintah berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengkonsentrasikan kegiatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan tertentu. Pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya sebagai daerah pemasok kebutuhan pusat pertumbuhan. Namun, tanpa disadari kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru yaitu ketimpangan pembangunan antar-daerah dan sekaligus juga ketimpangan pendapatan antara daerah.

Akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan pembangunan antar daerah. Misalnya jika terjadi penambahan dana pembangunan, akan lebih membawa dampak peningkatan pendapatan masyarakat, yang tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini akan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih besar sehingga meningkatkan pendapatan

masyarakat. Maka beban daerah-daerah tertentu dapat dikurangi karena berkurangnya penduduk yang melakukan perpindahan antar daerah.

Sejalan dengan itu, maka kebijakan pembangunan nasional sesuai Tap MPR RI Nomor IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 memuat salah satu misi pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah itu sendiri menurut regulasi ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

Undang-Undang desentralisasi membuka peluang bagi daerah untuk dapat secara lebih baik dan bijaksana memanfaatkan potensi yang ada bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat rendah. Terdapat daerah-daerah yang dapat menangkap peluang ini dengan cepat dan berinisiatif untuk mengembangkannya, namun sebaliknya terdapat daerah lain yang masih terhambat oleh berbagai keterbatasan yang ada, seperti yang dinyatakan oleh Matsui (2005) bahwa hambatan paling besar seringkali muncul pada pemahaman yang terbatas terdapat desentralisasi oleh kapasitas wilayah dan pemerintah lokal sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan wilayah.

Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri diatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,73 persen pada tahun 2005, angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional Indonesia yakni 5,69 persen, begitupun sampai tahun 2013 yang mencapai 6,18 persen, sedangkan rata-rata nasional mencapai 5,73 persen.

Selanjutnya jika dilihat dari kontribusi PDRB Kabupaten/Kota selama tahun 2005 sampai dengan 2013 terhadap Provinsi Sumatera Barat (lampiran 1.1) sangat bervariasi. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan sangat signifikan sebagai penyumbang PDRB dengan rata-rata mencapai 29,07 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya signifikan dibawah kontribusi Kota Padang dengan rata-rata kontribusi tertinggi hanya mencapai 7,66 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tumbuh positif setiap tahunnya terkecuali untuk tahun 2009 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ini disebabkan adanya bencana alam gempa bumi. Jika diamati menurut Kabupaten/Kota, masih banyaknya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada dibawah Provinsi, ini menggambarkan adanya daerah yang cenderung mengalami perkembangan yang relatif cepat dan

ada yang justru melambat. Pada dasarnya perkembangan daerah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial serta ketersediaan sarana dan prasarana dimana faktor ekonomi lebih dominan mempengaruhinya (Priyadi, 2008). Perbedaan pertumbuhan antar wilayah merupakan sebuah petunjuk bahwa adanya ketidakberimbangan pembangunan antar sektor dan wilayah. Disparitas atau kesenjangan dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak seimbang atau ketidakberimbangan atau ketidaksimetrisan (Chaniago, 2000).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah (Sjafrizal, 2012) adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar.

Disamping itu, dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendanaan pada APBD Kabupaten/Kota dengan proporsi rata-rata tahun 2005 sampai 2013 mencapai 85,48 persen pada APBD dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK masing-masingnya bernilai positif yakni 5,74 persen, 19,34 persen, dan 28,92 persen dari tahun 2001 sampai 2013. Investasi pemerintah yang bersumber dari APBD yang secara tidak langsung merupakan penggunaan dana perimbangan itu sendiri dikarenakan proporsi yang dominan sebagai bentuk implikasi otonomi daerah.

Sebagai bentuk implikasi dari pemberian kewenangan otonomi daerah adalah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan. yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri, oleh daerah baik dari sisi perencanaan

pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (2) mendorong perkembangan perekonomian daerah, (3) mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, (4) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (5) meningkatkan PAD dan (6) mendorong kegiatan investasi (Sidik, 2004).

Dari uraian diatas maka diperoleh pokok permasalahan yang akan menguraikan ketimpangan ekonomi diukur dari PDRB antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota, pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan, dan merumuskan kebijakan pembangunan sebagai jawaban atas permasalahan.

1.2 Perumusan Masalah

Terlihat bahwa peranan pemerintah pusat sangat besar dalam membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu dalam bentuk dana perimbangan yang meliputi DBH, DAU, dan DAK (Sidik, 2004). Harapan pemerintah pusat dalam pemanfaatan alokasi dana perimbangan dialokasikan pada pembiayaan pembangunan yang berdasarkan nilai kebutuhan masyarakat di daerah serta dapat menunjang kegiatan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota memiliki perbedaan yang

sangat signifikan terhadap satu daerah, ini menggambarkan adanya daerah yang cenderung mengalami perkembangan yang relatif cepat dan tidak diikuti oleh daerah lainnya. Kondisi demikian dikhawatirkan dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan Kabupaten/Kota lain cenderung semakin tertinggal, sedangkan alokasi dana perimbangan setiap tahunnya cenderung meningkat ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2005-2013?
- (2) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat?
- (3) Apa kebijakan yang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

- (1) Mengetahui ketimpangan pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2005-2013.

- (2) Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Merumuskan Kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi ilmu

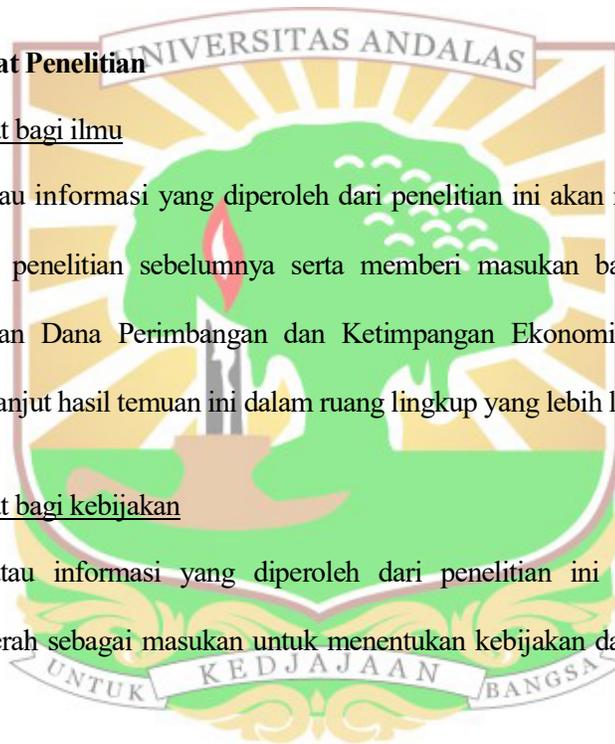
Data atau informasi yang diperoleh dari penelitian ini akan memperkuat teori yang ada dari penelitian sebelumnya serta memberi masukan bagi peneliti yang berminat dengan Dana Perimbangan dan Ketimpangan Ekonomi Regional untuk meneliti lebih lanjut hasil temuan ini dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Manfaat bagi kebijakan

Data atau informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan pemerintah daerah sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat bagi peneliti

Data atau informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu-ilmu perencanaan pembangunan.



1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- (1) Bab I adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- (2) Bab II adalah pendekatan teori dan studi literatur, yang berisi pendekatan teori, studi literatur, kerangka pemikiran, dan hipotesa.
- (3) Bab III adalah metode penelitian, yang berisi jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.
- (4) Bab IV adalah gambaran umum daerah penelitian, yang berisi karakteristik wilayah dan kependudukan, kondisi perekonomian, dan dana perimbangan Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
- (5) Bab V adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil uji asumsi klasik, ketimpangan ekonomi regional dan hasil pengujian hipotesis, pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan, dan kebijakan mengurangi ketimpangan.
- (6) Bab VI adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.